

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan II tahun 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 0,80% (YoY). Berdasarkan catatan tersebut, tekanan inProvinsi Gorontalo mendekati rentang $2,5\% \pm 1$. TPID Provinsi Gorontalo senantiasa memfokuskan program-program pengendalian inflasi pada peningkatan kapasitas produksi guna meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan dan komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi serta melakukan stabilisasi dan monitoring harga secara intensif.

Berdasarkan data perkembangan harga pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, pada triwulan II 2025, harga beras mengalami peningkatan harga seiring dengan persediaan yang terbatas. Tanaman padi baru mengalami panen kedua pada minggu-2 Juni. Pada bulan April - Mei 2025, harga beras IR-64 sebesar Rp15.625 per kg, namun mulai awal Juni 2025 harganya mulai naik menjadi Rp16.250 per kg.

Komoditas bawang merah yang bukan merupakan spesialisasi Provinsi Gorontalo turut menyumbang inflasi pada triwulan II-2025. Bawang merah yang selama ini bergantung pada pasokan dari Enrekang mengalami pengurangan pengiriman yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari luar Pulau Sulawesi. Harga bawang merah pada bulan April 2025 sebesar Rp60.000 per kg, bulan Mei 2025 mengalami penurunan pada harga Rp45.000 per kg, kemudian bulan Juni 2025 naik kembali menjadi Rp60.000 - Rp75.000 per kg.

Harga tomat mengalami peningkatan disebabkan oleh penurunan hasil panen akibat cuaca yang kurang kondusif. Harga tomat pada bulan April 2025 sebesar Rp15.000 - Rp20.000 per kg, kemudian bulan Mei 2025, harga tomat turun menjadi Rp15.000 per kg. Namun bulan Juni 2025 mengalami kenaikan kembali pada harga Rp20.000 - Rp25.000 per kg.

Risiko ke depan, tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo diperkirakan cukup moderat seiring dengan disalurkan nya bantuan pangan pemerintah periode Juni-Juli diperkirakan mengurangi permintaan terhadap komoditas pangan di pasaran. Prospek dibukanya Kembali izin penyaluran SPHP dan panen kedua komoditas beras yang telah dimulai pada akhir Juni diperkirakan berpengaruh terhadap penurunan harga beras di pasar. Namun demikian, dampak rambatan dari fenomena gagal panen di Bima (NTB) dan beberapa daerah sentra lain diperkirakan akan mempengaruhi harga komoditas bawang merah dan tomat yang disebabkan meningkatnya permintaan komoditas dari Pulau Sulawesi seperti yang terjadi pada Juni 2025.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo disebabkan dari kelompok *volatile food*. Pada triwulan II-2025 terjadi pada komoditas BARITO (Bawang, Rica, dan Tomat) yang tercatat mengalami peningkatan harga seiring dengan persediaan yang terbatas. Tanaman padi baru mengalami panen kedua pada minggu-2 Juni, ditengah kelangkaan persediaan, beras SPHP Bulog juga pada bulan Juni belum dapat disalurkan sehingga memicu peningkatan harga beras.

Komoditas yang bukan merupakan spesialisasi Provinsi Gorontalo seperti bawang merah dan tomat juga turut menyumbang inflasi secara signifikan. Bawang merah yang selama ini bergantung pada pasokan dari Enrekang mengalami pengurangan pengiriman yang

disebabkan meningkatnya permintaan dari luar Pulau Sulawesi dampak dari gagal panen di daerah Bima, NTB.

Komoditas tomat mengalami peningkatan harga terutama disebabkan oleh pasokan dari daerah Minahasa, Sulut mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan hasil panen akibat cuaca yang kurang kondusif.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai strategi pengendalian inflasi terus dilakukan dan menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk mendorong kembali realisasi inflasi agar tetap berada dalam sasaran target inflasi nasional. Program-program dirumuskan dengan tetap mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi dengan mengedepankan prinsip 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). TPID Provinsi Gorontalo pada Triwulan II tahun 2025 telah melakukan sejumlah upaya pengendalian harga pangan sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga

1. Melakukan sidak dan pemantauan harga pangan
2. Pelaksanaan pasar murah bersubsidi di kabupaten/kota
3. Pelaksanaan GPM menjelang Idul Adha di kabupaten/kota
4. Penyerahan Bantuan Langsung Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) di kabupaten/kota dengan penerima bantuan sebanyak 9.000 KPM
5. Pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan difungsikan sebagai RPK Bulog
6. Operasionalisasi Agripos untuk stabilisasi harga pangan.

Ketersediaan Pasokan

1. Penyerapan padi dan jagung oleh Bulog Gorontalo dengan capaian 95,39% dari total target 1.004 ton beras, jagung capaiannya sebesar 13,75% dari target 26.000 ton
2. Panen padi dan jagung di kabupaten/kota
3. Penyerahan 58 traktor ke petani se-Provinsi Gorontalo dari bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian
4. Penanaman Padi Gogo pada lahan seluas 5 Ha di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango
5. Pemberian bantuan peningkatan produktivitas sisi hulu pada tiga kluster binaan BI
6. Program pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman serta pertanian organik tahap 1 tahun 2025

Kelancaran Distribusi

1. Fasilitasi distribusi pada pelaksanaan GPM menjelang Idul Adha
2. Subsidi ongkos angkut pada GPM dan Operasi Pasar Lebaran Ketupat
3. Fasilitasi distribusi pada GPM PESONA TAMETO 23-24 Mei 2025

Komunikasi Efektif

1. Relokasi pedagang non-ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tenda ke Pasar Sentral
2. Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah mingguan bersama TPID Provinsi

Gorontalo

3. Pembentukan Balai Penerapan modernisasi pertanian Gorontalo
4. HLM TPID Kota Gorontalo pada 17 April 2025
5. HLM TPID Kabupaten Bone Bolango pada 22 Mei 2025

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo Triwulan II-2025 adalah program dan kebijakan yang dilakukan guna mengatasi permasalahan harga, pasokan dan distribusi untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga. Pendekatan pemerintah daerah terhadap permasalahan harga, pasokan dan distribusi melalui kebijakan regulasi dan pengawasan terhadap sektor-sektor ekonomi misalnya pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok, pelaksanaan pasar murah bersubsidi dan GPM di beberapa titik dan lokasi dengan frekuensi serta komoditas pangan strategis. Ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga juga melibatkan Ritel Modern (Alfamart dan Indomaret), serta gerakan tanam cabai dan panen raya padi dan jagung. Fasilitas distribusi pangan pada pelaksanaan GPM di kabupaten/kota.

Untuk dapat memperkuat program dan kebijakan yang sudah ada, ke depannya diperlukan penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi ketidakstabilan harga, kerja sama perdagangan antar daerah dan kabupaten/kota, penguatan koordinasi serta memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan konsumsi masyarakat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo pada Triwulan II 2025, dalam rangka menjaga pasokan, keterjangkauan harga serta mengendalikan inflasi daerah, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten melakukan hal-hal sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga

1. Mendorong keterjangkauan harga komoditas bahan pokok melalui pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi/Gelar Pangan Murah/Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G).
2. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak khususnya beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, dan minyak goreng melalui pemanfaatan *early warning system* (SP2KP/PIHPS BI) atau pemantauan langsung oleh anggota TPID

Ketersediaan Pasokan

1. Melakukan sinergi pada pengendalian inflasi pangan melalui program seperti KAD dan *Urban Farming*.
2. Mengintensifkan gerakan menanam cabai rawit guna mengantisipasi peningkatan permintaan dan risiko tekanan inflasi pada komoditas cabai rawit.
3. Menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan, khususnya Beras melalui perluasan penyaluran Beras SPHP oleh BULOG

Kelancaran Distribusi

1. Memanfaatkan Jembatan dan Tol laut untuk memperlancar distribusi.
2. Fasilitasi distribusi pangan pada pelaksanaan GPM.

Komunikasi Efektif

1. Mengintensifkan publikasi layanan masyarakat belanja bijak yang bekerjasama dengan RRI dan TVRI serta memanfaatkan media sosial lainnya.